

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak, membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Beberapa macam pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Pangkep diantaranya yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan perusahaan atau industri akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak reklame karena salah satu bauran pemasaran

sebuah industri adalah promosi yang terdiri antara lain iklan, reklame dan promosi penjualan. Pajak Reklame sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah yang berpotensi perlu dilakukan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pangkep.

Pajakreklame di Kabupaten Pangkep diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Bab VI (Enam). Dalam Pasal 26 ayat (1) Perda tersebut dikatakan bahwa Objek Pajak Reklame adalah penyelenggaraan Reklame dan Objeknya adalah: a. Reklame papan/billboard/video/megatron dan sejenisnya; b. Reklame kain; c. Reklame melekat, stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame suara; i. Reklame film/slide; dan j. Reklame peragaan.

Pemasukan dari pajak reklame didapat dari nilai sewa reklame yang dipasang dengan tarif sewa reklame berdasarkan dari lokasi pemasangan reklame, lamanya pemasangan reklame, dan jenis ukuran reklame. Pihak-pihak yang menggunakan jasa reklame dari bidang pendidikan, industri, perhotelan, hiburan, bank-bank dan lembaga keuangan, transportasi, komunikasi dan pihak pemerintah.

Pajak reklame seharusnya cukup potensial untuk mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkep dikarenakan setiap tahunnya semakin banyak reklame yang

terpasang disepanjang jalan, terkhusus di Kecamatan Pangkajene sebagai jantung Kabupaten Pangkep.

Banyaknya permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan pajak reklame diantaranya adalah kurangnya kesadaran untuk membayar pajak oleh wajib pajak. Masalah yang lain adalah kurangnya petugas luar yakni petugas yang diperintahkan untuk melakukan penagihan maupun pengawasan dalam pemasangan dan pencabutan reklame sehingga dapat mengakibatkan kesempatan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pengelolaan pajak reklame.

Oleh karena itu untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak reklame maka diperlukan adanya sebuah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan sesuai dengan konsep fungsi manajemen.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak reklame yang merupakan salah satu pajak daerah yang diharapkan dapat memberikan andil yang besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat menyukseskan pembangunan daerah. Untuk itu penulis merasa penting melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Pajak Reklame di Kabupaten Pangkep”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyusunan perencanaan pemasangan reklame yang dilakukan oleh Pemerintah KabupatenPangkep?

2. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah KabupatenPangkep?
3. Bagaimana pengawasan pajak reklame yang dilakukan oleh Pemerintah di KabupatenPangkep ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai penyusunan perencanaan pemasangan reklame yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pangkep.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai pelaksanaan pemungutan pajak reklame di dinas pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep.
3. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai pengawasan pajak reklame yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangkep.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoretis**

Secara teoretis manfaat dari hasil penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai pengembangan pustaka ilmu pengetahuan dalam perpustakaan serta dapat digunakan sebagai bahan bacaan bagi yang akan melakukan penelitian sejenis.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Pemerintah daerah Kabupaten Pangkep, diharapkan dapat bermanfaat dan berfungsi sebagai bahan masukan dan referensi bagi dinas pendapatan daerah Kabupaten Pangkep untuk lebih mengefektifkan pengelolaan pajak reklame.

- b. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi oleh masyarakat untuk mengetahui tentang pengelolaan pajak reklame untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkep.
- c. Bagi Peneliti, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan atau wawasan bagi penulis mengenai pengelolaan pajak reklame untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Pengelolaan Pajak Reklame Di Kabupaten Pangkep pada Bab IV, maka disimpulkan :

1. Penyusunan Perencanaan Pemasangan Pajak Reklame meliputi empat tahap yaitu pemberian izin pemasangan reklame, pemilihan lokasi pemasangan reklame, jangka waktu pemasangan reklame, dan target pajak reklame. Dalam hal penentuan target pajak reklame di Kabupaten Pangkep telah optimal, hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan dari tahun ke tahun, khususnya 2 tahun terakhir yakni tahun 2014-2015 telah mencapai target yang ditentukan. Tetapi dalam pemasangan reklame masih ada beberapa reklame yang tidak memenuhi standar keselamatan yang dapat membahayakan pengguna jalan dan masyarakat di sekitarnya.

2. Pelaksanaan pemungutan pajak reklame dilakukan dengan cara wajib pajak atau pemohon datang langsung ke kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep untuk melakukan pembayaran pajak reklame yang mereka pasang.
3. Pengawasan yang dilakukan oleh Dispenda dalam Pengelolaan Pajak Reklame telah maksimal, hal ini dapat dilihat dengan dibentuknya tim yang khusus melakukan pemantauan langsung di lapangan. Tetapi dalam hal terjadinya pelanggaran pihak Dispenda belum tegas memberikan sanksi hukum.

## **B. IMPLIKASI**

Sebagai suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan pemerintahan maka kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi dalam bidang pemerintahan khususnya dalam proses pemungutan pajak dan penelitian-penelitian selanjutnya, seperti :

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses pemungutan pajak khususnya pajak reklame dimulai dengan tahap perencanaan kemudian pelaksanaan dan terakhir pengawasan. Apabila ketiga tahap ini berjalan efektif atau optimal, maka akan berdampak baik terhadap pemerintah dan masyarakat karena memberikan pemasukan terhadap PAD di Kabupaten Pangkep dan menjadi salah satu sumber dana pelaksanaan pembangunan baik secara nasional maupun di daerah.

## **C. SARAN**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pengelolaan pajak reklame dengan melihat hasil dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal pengelolaan pajak reklame, Pihak dispenda harus mempertahankan pengelolaan pajaknya agar penerimaan dari tahun sebelumnya dapat melebihi target yang telah ditentukan. Dan tim yang diutus turun langsung melakukan pemantauan

dilapangan perlu memperhatikan standar keselamatan pemasangan reklame yang telah ditentukan.

2. Pihak Dispenda harus memberikan peringatan kepada wajib pajak apabila terlambat atau lupa membayar pajak reklame yang mereka pasang.
3. Pihak Dinas pendapatan daerah harus bertindak lebih tegas dalam pemberian sanksi hukum sesuai dengan aturan yang ada kepada pemasang reklame yang melakukan pelanggaran.